

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul Masa Pemerintahan Kabinet Ali Sastroamidjojo I (1953-1955) ini memuat tiga pokok permasalahan : pertama proses pembentukan kabinet, kedua pelaksanaan program kerja, ketiga jatuhnya kabinet. Tujuan penulisan adalah untuk mengetahui bagaimana jalannya pemerintahan di Indonesia selama kabinet Ali Sastroamidjojo I memegang kekuasaan. Sejalan dengan studi yang ditekuni, maka dalam penulisan ini digunakan metode sejarah yang mencakup : penemuan sumber, kritik sumber (ekstern dan intern), analisis sumber, sintesis, interpretasi, koroborasi, dan historiografi.

Kabinet Ali Sastroamidjojo I yang disebut juga dengan Kabinet Ali I, merupakan kabinet yang paling lama memerintah dalam masa demokrasi parlementer/liberal di Indonesia. Kabinet ini baru terbentuk setelah melewati masa krisis selama 58 hari dengan pergantian formatur sebanyak 5 kali. Percobaan pertama dilakukan oleh Sarmidi Mangunsarkoro (PNI) dan Muhammad Roem (Masjumi) kemudian diganti oleh Mukarto Notowidigdo (PNI) yang ditunjuk sampai dua kali dengan tugas yang berbeda. Presiden kemudian menunjuk Burhanuddin Harahap (Masjumi) tapi usahanya juga gagal. Kemudian ditunjuk Wongsonegoro (PIR) dan dia berhasil membentuk kabinet baru yang berkoalisi dengan PNI, NU, dan Partai Nasional kecil lainnya. Mereka memulai tugas pada tanggal 1 Agustus 1953 yang dikenal juga sebagai kabinet Ali-Wongso-Arifin sesuai dengan nama Perdana Menteri dan wakilnya.

Untuk melaksanakan tugasnya kabinet mempunyai empat pokok program yaitu : Dalam Negeri (Keamanan, pemilu, kemakmuran dan keuangan), Irian Barat, Luar Negeri (Politik bebas aktif, peninjauan kembali perjanjian KMB), Kebijaksanaan pemerintah mengenai masalah penambangan minyak di Sumatera Utara dan pembagian tanah

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

di Sumatera Timur.

Untuk bidang keamanan pemerintah dihadapkan dengan pemberontakan Daud Beureuh di Aceh, demikian juga di bidang pemilu. Kritik lainnya dilancarkan terhadap kebijaksanaan ekonomi yang dikenal dengan kebijaksanaan Indonesianisasi. Masalah Irian Barat pemerintah berusaha untuk merebutnya kembali dengan memasukkannya ke dalam agenda sidang umum PBB.

Politik Luar Negeri dapat dikatakan berhasil walaupun ada yang kurang memuaskan. Sukses terbesar adalah diselenggarkannya KAA di Bandung pada tanggal 18-24 April 1955 yang dihadiri oleh 29 negara dan menghasilkan Dasa Sila Bandung. Kebijaksanaan pemerintah mengenai pembagian tanah di Sumatera Timur, pemerintah meminta Gubernur Medan untuk menghentikan pentraktoran pemukiman dan menyediakan pemukiman baru. Mengenai penambangan minyak di Sumatera Utara pemerintah tidak dapat memutuskan apakah penambangan tersebut dikembalikan kepada Belanda atau tidak.

Setelah memerintah sekitar 2 tahun Kabinet Ali I akhirnya jatuh juga. Hal itu dimulai dengan adanya oposisi terhadap kebijaksanaan perekonomian Indonesianisasi. Akibat oposisi ini banyak partai yang menentang kabinet termasuk PIR yang menjadi pendukung utama kabinet. Masalah yang benar-benar menyebabkan jatuhnya kabinet adalah masalah Angkatan Darat. Setelah Kolonel Bambang Sugeng mengundurkan diri, pemerintah menunjuk Kolonel Bambang Utojo sebagai KSAD yang baru. Penunjukan ini di boikot oleh Kolonel Zulkifli Lubis dan perwira lainnya yang tidak setuju dengan pengangkatan tersebut. peristiwa tersebut terkenal dengan peristiwa 27 Juni 1955. Masalah itu tidak dapat diselesaikan dan kabinet terpaksa mengembalikan mandatnya pada tanggal 24 Juli 1955 kepada Wakil Presiden Mohammad Hatta.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ABSTRACT

THE ERA OF THE GOVERNMENTAL CABINET OF ALI SASTROAMIDJOJO I (1953-1955)

There are three important points on the thesis entitled "The Era of the Governmental Cabinet Ali Sastroamidjojo I (1953-1955) namely the Process of the Forming Cabinet, the Run of Cabinet's Work Program and the Fall of the Cabinet. It is generally aimed to find out and analyze the Ali I Cabinet in Indonesia. The historical method was use which included: source finding, source criticism (external and internal), source analysis, synthesis, interpretation, corroboration, and historiography.

The Ali Sastroamidjojo cabinet, known as the Ali I cabinet, was longest governmental cabinet in the era of parliamentary/liberal democracy in Indonesia. The new cabinet was formed after passing through the 58 days crisis with the formateur changing for about five times. The first trial was done by Sarmidi Mangunsarkoro (PNI) and Mohammad Roem (Masjumi). Later, Mukarto Notowidigdo (PNI) replaced them as the new formateur, chosen twice with different job. The President appointed Burhanuddin Harahap (Masjumi) then but also failed. Next, Wongsonegoro (PIR) was appointed and he succeeded in forming the new cabinet which unified with PNI.NU, and other small National Parties. It started its work on August 1st 1953, known as Ali-Wongso-Arifin cabinet which based on the names of Prime Minister and the Vice.

For doing the job, the cabinet had four fields of work namely Internal Affairs (Security, General Election, Prosperity and Finance), West Irian, Foreign Affair (Nonblock and Active Politic, the Review of KMB Agreement), the Governmental Policy of Oil Mining in

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

North Sumatera and the Land Distribution in East Sumatera. When doing this, there were many interruption from the oppositions, for example, PUSA rebellion of Daud Beureuh in Aceh and the same for General Election.

The next criticism was for economic policy which known as the Indonesianization. About West Irian, the government tried to retake over it by proposing this matter to the General Court schedule of UNO. The Foreign affairs program might succeed though there was something unsatisfying. The greatest success in this cabinet era was the Asia-Africa conference on 18-24 April 1955 in Bandung which was attended by 29 countries and produced the document of Dasa Sila Bandung.

The governmental policy about the land distribution in East Sumatera was, the government asked the Governor of Medan to stop tractorizing wild housing and then supply it with the new residences. About mining in North Sumatera, the government could not decide whether the oil mining would be handled by the Dutch or not.

Running for about two years, the Ali cabinet finally fell down. It began with the criticism for the Minister of Economy policy about its Indonesianization. Many parties became the opposants, even PIR, the primary supporter of Ali I cabinet. The problem which really it down was the Army. After General Bambang Sugeng resigned, the government appointed Colonel Bambang Utojo to replace him. The appointment was boycotted by Colonel Zulkifli Lubis and other officer who disagreed. It was known as the "Incident of June 27th 1955". The government could not maintain cabinet because of being heavily pushed from Army and parties. On July 24th 1955 the Prime Minister gave mandate back to Mohammad Hatta and it became the end of Ali I cabinet.